



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 125 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PARKIR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada setiap Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Parkir pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Perhubungan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Parkir yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelola Parkir adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Parkir pada Dinas Perhubungan.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Parkir pada Dinas Perhubungan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Pengelola Parkir Kelas A pada Dinas Perhubungan.

## BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

## Kedudukan

## Pasal 3

- (1) UPTD Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dalam pengelolaan parkir.
- (2) UPTD Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

### Tugas

#### Pasal 4

UPTD Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan parkir.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengelola Parkir mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi Pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan parkir;
- b. pelaksanaan pengelolaan parkir dan pengaturan fasilitas pendukung lainnya di bidang perparkiran;
- c. pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI,

#### DAN KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelola Parkir terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Kepegawaian

#### Paragraf 1

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Pengelola Parkir diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Eselon

#### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

### BAB V

#### RINCIAN TUGAS UNIT

#### Bagian Kesatu

#### Kepala UPTD

#### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, koordinasi, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Pengelola Parkir dalam pengaturan, pemeliharaan dan pengelolaan parkir serta retribusi parkir.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja UPTD Pengelola Parkir;
  - b. melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Pengelola Parkir;
  - c. melaksanakan pengendalian dan pengaturan pengelolaan parkir;
  - d. melaksanakan pelayanan informasi pengelolaan parkir kepada masyarakat;
  - e. melaksanakan pemantauan operasional kegiatan perparkiran;
  - f. melaksanakan pembinaan personil, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD Pengelola Parkir;
  - g. melaksanakan pengelolaan retribusi parkir;
  - h. melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Pengelola Parkir;
  - i. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset UPTD Pengelola Parkir;
  - j. melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pengelola Parkir;
  - k. melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Pengelola Parkir;
  - l. melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPTD Pengelola Parkir;
  - m. melaksanakan hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan pengelolaan parkir dan retribusi parkir;

- n. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dalam pengelolaan parkir;
- o. melaksanakan penyusunan administrasi pengelolaan retribusi parkir;
- p. melaksanakan pengembangan inovasi dalam pelaksanaan pengelolaan parkir dan retribusi parkir;
- q. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Pengelola Parkir; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 10

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPTD Pengelola Parkir.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja UPTD Pengelola Parkir;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPTD Pengelola Parkir;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Pengelola Parkir;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Pengelola Parkir;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Pengelola Parkir;
  - f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPTD Pengelola Parkir;
  - g. melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Pengelola Parkir;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pengelola Parkir;
  - j. melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPTD Pengelola Parkir;
  - k. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD Pengelola Parkir; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Pengelola Parkir baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Pengelola Parkir harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan;
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 12

- (1) Pada UPTD Pengelola Parkir dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 13

Pembiayaan UPTD Pengelola Parkir dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Parkir pada Dinas Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 2 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

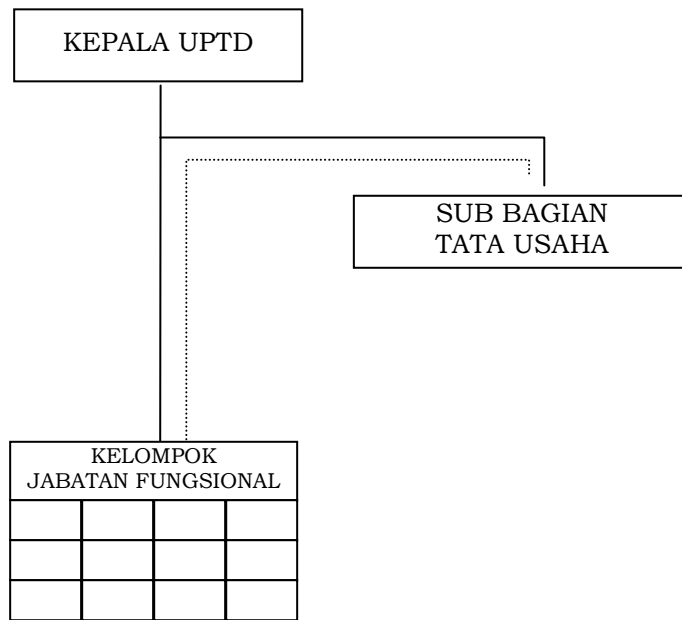
IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 125



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 125 TAHUN 2019  
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 PENGELOLA PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPTD PENGELOLA PARKIR  
 PADA DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO